

Penguatan Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Wisata Pantai Bahari Monano melalui Pendekatan Partisipatif

Lisnawati Paweni^{1*}, Muten S Nuna², Muhamad R Tjokra³, Ahlar Biongan⁴, Sarfan Tabo⁵

^{1,2,4,5} Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo -Gorontalo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo -Gorontalo

E-mail (correspondences): lisna.paweni@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted:

8 Agustus 2025

Review:

3 September 2025

Accepted:

1 Oktober 2025

Available online:

10 Oktober 2025

ABSTRAK

Pantai Wisata Bahari Monano di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, pengelolaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara pengelola dan masyarakat, minimnya fasilitas pendukung, serta belum terintegrasinya nilai-nilai lokal dalam aktivitas wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen tata kelola wisata berbasis partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Dinas Pariwisata, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan wisatawan. Analisis data menggunakan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Metode ini fokus pada penggambaran secara mendalam mengenai kondisi dan proses yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan belum melibatkan masyarakat secara aktif, pengorganisasian belum memiliki struktur formal seperti Pokdarwis, pengarahan masih bersifat informal, dan pengawasan dilakukan secara sukarela tanpa sistem yang terstruktur. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas masyarakat, minimnya fasilitas wisata, serta lemahnya integrasi nilai-nilai budaya lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengelolaan wisata di Pantai Wisata Bahari Monano diarahkan pada pembentukan struktur kelembagaan resmi seperti Pokdarwis guna memfasilitasi partisipasi masyarakat secara sistematis. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan anggaran dan dukungan teknis untuk pembangunan fasilitas wisata yang memadai. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat lokal penting dilakukan agar mereka memiliki kapasitas dalam mengelola potensi wisata secara mandiri. Integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam program wisata juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat identitas kawasan serta memperluas daya tarik bagi wisatawan.

Kata Kunci: Tata Kelola Wisata, Partisipasi Masyarakat, Pantai Monano, Manajemen

ABSTRACT

The Monano Marine Tourism Beach, located in Monano District, North Gorontalo Regency, is an area with significant potential to be developed into a leading tourist destination. However, its management still faces various challenges, such as lack of coordination between managers and the community, inadequate supporting facilities, and the absence of integration of local values into tourism activities. This study aims to analyze tourism governance management based on community participation using the four functions of management: planning, organizing, actuating, and controlling. Additionally, the research identifies the factors that hinder community involvement in managing the tourism area. This study employs a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Informants include representatives from the Tourism Office, village government, local communities, and tourists. The findings reveal that planning has not actively involved the community, organizing lacks a formal structure such as the Pokdarwis (Tourism Awareness Group), actuating remains informal, and controlling is conducted voluntarily without a structured system. Key inhibiting factors include limited budget, low community capacity, insufficient tourism infrastructure, and weak integration of local cultural values. Based on the research findings, it is recommended that tourism management at Monano Marine Tourism Beach focus on establishing an official institutional structure such as Pokdarwis to systematically accommodate community participation. The local government should also increase budget allocation and provide technical support for the development of adequate tourism facilities. Moreover, training and mentoring for local communities are crucial to enhance their capacity in independently managing tourism potential. The integration of local cultural values into tourism programs also needs to be strengthened to reinforce the area's identity and broaden its appeal to tourists.

Keywords: Tourism Governance, Community Participation, Monano Beach, Management

PENDAHULUAN

Manajemen tata kelola wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dapat mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, memperkuat rasa kepemilikan terhadap kawasan wisata, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata dapat menyebabkan konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, serta terbatasnya dampak ekonomi bagi komunitas lokal. Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano yang terletak di Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki potensi yang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Keindahan alam, kekayaan hayati laut, serta tradisi lokal yang khas merupakan aset berharga yang dapat mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Namun, optimalisasi kawasan ini sebagai destinasi wisata masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kurangnya tata kelola yang efektif dan berkelanjutan (Darmawan et al., 2025).

Tata kelola sektor pariwisata mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pemantauan, serta evaluasi. Proses ini tidak akan berjalan secara optimal jika hanya mengandalkan pendekatan pelaksanaan dari atas ke bawah (*top down*), apalagi jika dilakukan secara parsial. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata (Matthoriq et al., 2021), keberhasilan tata kelola pariwisata sangat bergantung pada sinergi antar unsur penta helix. Diperlukan kolaborasi yang efektif antara para pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata dalam wadah Organisasi Manajemen Destinasi, yang melibatkan lima elemen utama dalam model penta helix atau yang dikenal dengan singkatan ABCGM, yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Kolaborasi ini merupakan bentuk pengembangan dari pilar pembangunan dalam era tata kelola (*governance*) (Akhyar et al., 2025).

Perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait meningkatnya angka kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data dari KPPPA, tahun 2023 tercatat lebih dari 20.000 kasus kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas kejadian terjadi di lingkungan rumah tangga (Nabila et al., 2024). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga sering kali sulit terdeteksi karena adanya stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anak (Basai & P, 2025).

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga memberikan berbagai dampak bagi komunitas lokal. Apabila suatu objek wisata dikembangkan dan dikelola dengan optimal, maka akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat setempat. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara, kontribusi sektor pariwisata secara nyata menurut Ridwanullah et al. (2021) dapat dilihat dari tiga aspek utama: terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara melalui devisa, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Salah satu dampak positif dari kemajuan industri pariwisata adalah peningkatan penerimaan devisa negara yang berkelanjutan, yang pada gilirannya turut mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Selain itu, sektor ini juga membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya, baik dalam bidang aksesibilitas dan informasi, transportasi, maupun pembangunan akomodasi wisata seperti rumah liburan (*vacation homes*). Dengan meningkatnya investasi tersebut, terbuka pula

lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata (Sahrul et al., 2025).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterlibatan aktif komunitas dalam mengenali serta memanfaatkan potensi dan nilai-nilai lokal yang dimiliki, seperti budaya, adat istiadat, kuliner tradisional, serta gaya hidup masyarakat. Dalam proses pengembangan destinasi wisata, komunitas diharapkan mampu secara mandiri mengelola dan menjadikan potensi tersebut sebagai daya tarik utama bagi para wisatawan. Melalui konsep *Community Based Tourism* (CBT), setiap anggota masyarakat diarahkan untuk berperan dalam rantai ekonomi sektor pariwisata. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang dapat mendukung pengembangan usaha kecil sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (Jaumil et al., 2025).

Kabupaten Gorontalo Utara, yang terletak di Provinsi Gorontalo, memiliki banyak destinasi wisata menarik. Salah satunya adalah Pantai Wisata Bahari yang berlokasi di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Pantai ini memiliki karakteristik berupa pasir pantai dengan perairan yang landai, tersedia fasilitas penginapan, serta dikelilingi oleh masyarakat yang ramah. Dari pantai ini, pengunjung dapat melihat tiga pulau sekaligus, yakni Pulau Raja, Pulau Bohu, dan Pulau Popaya. Pantai Monano telah menjadi salah satu objek wisata yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara. Upaya pengembangan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Desa Monano. Dengan adanya pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang yang memadai untuk mendukung aktivitas wisata di Pantai Monano, potensi kedatangan wisatawan pun semakin meningkat (Hero, 2025).

Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. berdasarkan observasi lapangan penelitian terkait Manajemen Tata Kelola Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat masih ditemukan sejumlah permasalahan diantaranya: 1) Kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dan masyarakat setempat dikawasan Pantai Wisata Bahari Monano muncul akibat tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata. Kebijakan yang sering dibuat sepihak oleh pengelola menciptakan jarak antara kedua pihak, sehingga masyarakat merasa kurang dilibatkan dan kehilangan rasa memiliki terhadap kawasan wisata tersebut. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya platform atau forum diskusi yang rutin, lemahnya sistem pengelolaan yang melibatkan semua pihak; 2) Minimnya fasilitas pendukung wisata dikawasan Pantai Wisata Bahari Monano menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan pariwisata yang efektif. Fasilitas seperti area parkir, tempat istirahat, toilet umum dan sarana pendukung lainnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan tetapi juga membatasi potensi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan (Tohopi et al., 2025).

Kurangnya perhatian terhadap pembangunan fasilitas ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya perencanaan yang matang, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur; 3) Belum terintegrasinya nilai-nilai lokal dalam kegiatan pengelolaan dikawasan Pantai Wisata Bahari Monano juga menjadi tantangan yang menghambatnya terciptanya tata kelola wisata yang berkelanjutan. Tradisi sering kali tidak diakomodasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan wisata, sehingga mengurangi identitas dan ciri khas kawasan tersebut. Hal ini dapat disebabkan

oleh kurangnya pemahaman pengelolaan terhadap pentingnya nilai-nilai lokal, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan. Sebagai dampaknya, masyarakat merasa kurang memiliki keterkaitan emosional dengan kegiatan wisata, yang berujung pada rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam mendukung pengelolaan kawasan secara aktif. Selain itu, potensi nilai budaya lokal sebagai daya tarik wisata juga tidak termanfaatkan secara optimal (Fuad Zis et al., 2025).

Promosi yang minim menyebabkan kawasan ini kurang dikenal oleh wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, sehingga potensi kunjungannya tidak berkembang secara maksimal. Akibatnya, daya tarik kawasan ini semakin terpinggirkan dibandingkan destinasi wisata lain yang lebih aktif dipromosikan. Jika tidak segera diatasi dalam jangka panjang, kombinasi dari kurangnya koordinasi, minimnya fasilitas, pengabaian nilai budaya dan lemahnya promosi ini dapat mengancam keberlanjutan kawasan wisata serta melemahkan manfaat sosial-ekonomi yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat setempat (Setiawati et al., 2025).

Meskipun Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano memiliki potensi pengembangan pariwisata yang signifikan, implementasi manajemen tata kelola berbasis partisipasi masyarakat masih belum optimal. Perencanaan masih bersifat parsial dan kurang melibatkan masyarakat secara menyeluruh; kelembagaan formal seperti Pokdarwis belum terbentuk secara efektif; pengarahan dilakukan secara informal tanpa pembinaan berkelanjutan; dan pengawasan masih bersifat sukarela tanpa sistem evaluasi atau indikator yang jelas. Belum terdapat penelitian yang mengukur secara komprehensif keempat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan) dalam kerangka partisipatif serta merumuskan model tata kelola terintegrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai inti pengelolaan Monano. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komprehensif dan mengusulkan model tata kelola berbasis partisipasi yang aplikatif untuk Monano.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan variabel kunci yang menentukan keberlanjutan sosial-ekonomi destinasi. Arnstein (1969) menekankan bahwa partisipasi harus dilihat sebagai spektrum yang berkaitan dengan derajat kekuasaan masyarakat dalam pengambilan Keputusan, model ini sering digunakan untuk menilai kualitas partisipasi dalam studi pembangunan dan pariwisata.

Pretty (1995), melengkapi perspektif tersebut dengan tipologi tujuan partisipasi, mulai dari partisipasi instrumental hingga partisipasi yang memberdayakan. Dalam konteks pengelolaan destinasi, literatur governance pariwisata (mis. Tosun; Bramwell & Lane) menunjukkan pentingnya kelembagaan lokal dan mekanisme kolaboratif untuk menyelaraskan kepentingan berbagai aktor. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa perencanaan partisipatif meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan, sementara kelembagaan lokal seperti Pokdarwis berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pemberdayaan komunitas. Namun, masih sedikit studi yang mengukur secara komprehensif keempat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan) dalam kerangka partisipatif serta merumuskan model tata kelola yang mengintegrasikan indikator monitoring dan evaluasi — gap inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Solusi untuk mengatasi tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pihak pengelolaan dan masyarakat menurut penelitian terdahulu (Nainggolan & Sihombing, 2022), Dalam pengembangan destinasi Pantai Paris di Tigaras, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas baik darat maupun laut, kemudian juga berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait pengelolaan tata ruang (Sahrul et al., 2025). sarana dan prasarana dan koordinasi juga dilakukan kepada kelompok sadar wisata dan masyarakat pengelolaan wisata dalam mengelolah destinasi wisata. Dan menurut (Sirih et al., 2024) menyatakan perlunya dibentuk sebuah koordinasi pariwisata tingkat kabupaten yang melibatkan semua stakeholder, seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat lokal, pelaku industri, lembaga swadaya masyarakat hingga akademisi (M. Ramli AT et al., 2024).

Tujuan umum dalam penelitian ini yakni menilai dan merumuskan model tata kelola pariwisata berbasis partisipasi masyarakat yang efektif untuk Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano. Tujuan khusus adalah (1) Mengukur tingkat partisipasi masyarakat pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan; (2) Menganalisis kendala dan faktor pendukung pelaksanaan fungsi manajemen tersebut; (3) Mengevaluasi peran kelembagaan lokal (mis. Pokdarwis) dalam pengelolaan wisata; (4) Menyusun model tata kelola berbasis partisipasi beserta indikator monitoring dan evaluasi yang dapat diimplementasikan di Monano.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tata kelola wisata berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling (pemilihan secara sengaja). Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Dinas Pariwisata, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan wisatawan, serta dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen instansi terkait, termasuk arsip dan laporan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa Monano. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap: kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan ini, peneliti mampu menyusun informasi secara sistematis untuk mengungkap pola pengelolaan, keterlibatan masyarakat, serta faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan wisata di kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan tata kelola wisata berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Dinas Pariwisata, pemerintah desa, masyarakat lokal, dan wisatawan, serta dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen instansi terkait, termasuk arsip dan laporan dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa Monano. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap: kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan ini, peneliti mampu menyusun informasi secara sistematis untuk mengungkap pola pengelolaan, keterlibatan masyarakat, serta faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan wisata di kawasan tersebut. Pendekatan kualitatif ini memberikan ruang untuk menggali perspektif subjektif dan konteks sosial budaya masyarakat setempat sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan

mendalam mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata (Agustianti et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Tata kelola Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat dikawasan Pantai Wisata Bahari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen tata kelola wisata berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan yang masih bersifat parsial dan kurang melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Dinas Pariwisata memang telah menjadikan Pantai Monano sebagai salah satu destinasi unggulan, namun rencana pengelolaan jangka panjang belum tersusun secara sistematis karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan membuat mereka tidak merasa memiliki kawasan wisata tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi (Meningkatkan et al., n.d.).

Aspek pengorganisasian, ditemukan bahwa belum ada struktur kelembagaan formal seperti Pokdarwis yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Saat ini, pengelolaan masih sepenuhnya dikendalikan oleh Dinas Pariwisata. Meskipun masyarakat, khususnya pemuda, kadang dilibatkan dalam kegiatan tertentu, namun peran mereka belum terstruktur dengan jelas. Ketiadaan lembaga pengelola berbasis masyarakat ini menyebabkan tidak adanya pembagian tugas yang efisien dan sistematis dalam pengelolaan kawasan (Prayuda et al., 2025).

Selanjutnya, pada aspek pengarahan atau penggerakan, pemerintah desa memang telah berupaya mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong atau acara hiburan. Namun, kegiatan ini masih bersifat informal dan tidak didukung oleh perencanaan serta pelatihan yang memadai (Budilaksono et al., 2025). Akibatnya, partisipasi masyarakat hanya muncul pada saat-saat tertentu dan belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kurangnya program pemberdayaan juga membuat masyarakat belum memiliki kapasitas yang cukup untuk berkontribusi secara optimal.

Pada aspek pengawasan, pengelolaan kawasan wisata masih dilakukan secara sederhana dan tidak terstruktur. Pengawasan terhadap fasilitas dan kegiatan wisata hanya dilakukan oleh individu tertentu, seperti penjaga karcis dan pemuda setempat yang bekerja secara sukarela. Tidak adanya sistem kontrol dan evaluasi menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan, seperti kurangnya kebersihan, kenyamanan pengunjung, dan keamanan, tidak dapat tertangani secara efektif (Hamid et al., 2025).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat dalam tata kelola wisata di Pantai Wisata Bahari Monano mencakup kurangnya koordinasi antara pihak pengelola dan masyarakat, minimnya fasilitas pendukung, tidak terintegrasinya nilai-nilai lokal dalam perencanaan dan kegiatan wisata, serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia (Lucia et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kelembagaan wisata berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penyediaan fasilitas wisata yang memadai, serta

integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam setiap aspek pengelolaan agar destinasi ini dapat berkembang secara berkelanjutan (Gelanggagani et al., n.d.).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen tata kelola wisata berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano belum mencapai optimalitas. Hal ini terutama terlihat dari proses perencanaan yang masih bersifat parsial dan kurang melibatkan seluruh warga masyarakat secara komprehensif. Walaupun Dinas Pariwisata menetapkan Pantai Monano sebagai destinasi unggulan, rencana pengelolaan jangka panjang belum tersusun secara sistematis akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kekurangan pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan ini menimbulkan rasa kurang memiliki terhadap kawasan wisata yang pada akhirnya mengurangi tingkat partisipasi aktif masyarakat (Andesta & Andre, 2025).

Pada aspek pengorganisasian, belum terbentuk struktur kelembagaan formal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Saat ini, pengelolaan masih sepenuhnya berada di bawah kontrol Dinas Pariwisata, dan meskipun masyarakat, khususnya kalangan pemuda, dilibatkan dalam beberapa kegiatan, peran mereka masih belum terstruktur dan jelas. Ketiadaan lembaga pengelola berbasis masyarakat ini menyebabkan tidak adanya pembagian tugas yang terorganisir sehingga pengelolaan kawasan menjadi kurang efisien dan sistematis (Wahyuni et al., 2025).

Lebih lanjut, dari segi pengarahan atau penggerakan, meskipun pemerintah desa telah berupaya mengajak masyarakat mengikuti kegiatan gotong royong dan acara hiburan, kebanyakan aktivitas tersebut masih bersifat informal tanpa dukungan perencanaan maupun pelatihan yang memadai. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung sporadis dan belum bisa menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Minimnya program pemberdayaan juga menyebabkan masyarakat belum memiliki kapasitas memadai untuk memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, pembentukan kelembagaan wisata berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pemenuhan fasilitas pendukung, serta pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal perlu menjadi fokus utama untuk pengembangan berkelanjutan Pantai Wisata Bahari Monano (Serig, 2011).

Secara keseluruhan, pengelolaan wisata berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano masih membutuhkan perhatian serius terutama dalam hal pembenahan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat (Jaumil et al., 2025). Keterlibatan masyarakat secara aktif dan sistematis sangat dibutuhkan agar pengelolaan wisata dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang optimal bagi komunitas setempat. Pemerintah daerah perlu mengambil peran strategis dalam memfasilitasi kerjasama lintas sektor serta penyediaan sumber daya yang memadai guna mendukung proses tersebut (Kasim & Lema, 2025).

Dengan penataan manajemen yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat yang terpadu, Pantai Wisata Bahari Monano memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menarik pengunjung tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Penting bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi, sehingga pengelolaan wisata tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja tetapi menjadi

tanggung jawab bersama yang menghasilkan keberlanjutan jangka panjang (Tsalitsatun et al., 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen tata kelola wisata di Kawasan Pantai Wisata Bahari Monano belum berjalan secara optimal pada keempat aspek fungsi manajemen. Perencanaan belum melibatkan masyarakat secara strategis, dengan kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya. Pengorganisasian belum memiliki struktur kelembagaan formal seperti Pokdarwis yang seharusnya menjadi penggerak utama pelibatan masyarakat. Pengarahan masih bersifat insidental dan tidak didukung pembinaan berkelanjutan, sementara pengawasan dilakukan tanpa sistem evaluasi atau indikator yang jelas. Kondisi ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan belum terciptanya pengelolaan wisata yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik, disarankan perlu dirancang perencanaan strategis jangka pendek dan panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal. Pembentukan Pokdarwis menjadi hal mendesak sebagai wadah resmi partisipasi warga, dengan struktur kerja yang jelas. Pengembangan fasilitas dasar seperti toilet, tempat sampah, dan papan informasi perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, pelestarian nilai-nilai lokal harus diintegrasikan dalam kebijakan dan aktivitas wisata guna memperkuat identitas budaya kawasan dan menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif serta berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangatlah penting untuk memperbaiki manajemen tata kelola wisata di Pantai Wisata Bahari Monano. Pendekatan partisipatif yang sistematis dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, destinasi wisata ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sehingga memberikan manfaat yang holistik bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A. ni, Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. In *Tohar Media* (Issue Mi). <http://repository.uki.ac.id/10956/1/MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif.pdf>
- Akhyar, Z., Kiptiah, M., Wahyu, W., Sarbaini, S., Adawiyah, R., Winarso, H. P., Ruchliyadi, D. A., Elmy, M., Fahlevi, R., Nugroho, D. A., Huda, N., & Hiliadi, W. (2025). Pengelolaan Lingkungan Pada Ekowisata dan Sumber Daya Pesisir di Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. *Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 115–120. <https://doi.org/10.20527/xegk2815>
- Andesta, I., & Andre, H. (2025). *Potensi Wisata Bahari dan Budaya Suku Sampan dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjuta di Kampung Panglong Kabupaten Bintan*. 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.55123/toba.v4i2.5452>

- Basai, E. P., & P, M. H. G. (2025). *Ekonomi Masyarakat (Studi pada objek wisata pantai di Desa Kiluan Negeri Tanggamus)*. 10(01). <http://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/download/4399/2514>
- Budilaksono, S., Sni, A., & Fitriansyah, A. (2025). *Pelatihan Keterampilan Digital Marketing dalam Mempromosikan Wisata Terumbu Karang bagi Karang Taruna Desa Wisata Sukarame*. 9, 362–370. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/4984/3804>
- Darmawan, A. K. D., Hadi, S., Muqaddas, Z., Ferdiansyah, D., Ariyanto, F., & Wahyurini, E. T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Tata Kelola Wisata Bahari Berbasis Digital di Desa Lembung, Kabupaten Pamekasan. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 9(1), 21–32.
- Fuad Zis, S., Bachrizal Tanjung, H., & Arif, E. (2025). *Pengembangan Wilayah Desa Wisata Bahari Berbasis Masyarakat*. 01, 145–157. www.alliedmarketresearch.com
- Gelanggagani, D., Nabire, A., Tengah, P. P., Studi, P., & Pemerintahan, A. (n.d.). *Strategi dinas pariwisata dalam pengelolaan teluk cenderawasih di kabupaten nabire provinsi papuatengah*. 1–10. [http://eprints.ipdn.ac.id/24869/1/degex repository.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/24869/1/degex%20repository.pdf)
- Hamid, R. Y., Salim, A., & Suhaeb, I. (2025). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Bahuluang Community Empowerment Strategy In Developing Tourist Objects On*. 7(2), 204–212. <https://doi.org/10.35965/ursj.v7i2.6044>
- Hero, P. (2025). *Wujud Harmonisasi Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Berkelanjutan Berbasis Blue Economy (Muhamad Khoirul Anam1 , Muhammad Fakhruddin Zukhri2) (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)*. 1–18. <https://prosiding.umy.ac.id/hero/index.php/hero/article/download/100/69>
- Jaumil, N., Ode, L., Mappesangka, D., Erfinda, Y., Studi, P., Perjalanan, U., & Jakarta, U. N. (2025). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Wisata Alam Berbasis Mangrove di Pulau Harapan , Kepulauan Seribu Jakarta*. 3(1), 16–26. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/pamasa/article/download/15776/7072>
- Kasim, H., & Lema, S. L. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekowisata di Kabupaten Alor. *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 80–87. <https://doi.org/10.30595/pshms.v7i.1450>
- Lucia, R. H., Samuel, O. W., Kawatak, S. Y., & Yamlean, R. (2025). *Strategi Pengembangan Aksesibilitas Wisata Bahari di Desa Wisata Budo Minahasa Utara*. 4(4), 5366–5375. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/download/9500/7296>
- M. Ramli AT, Nurlela, A., Ria Renita Abbas, Musrayani Usman, Hariashari Rahim, & Novia Fridayanti. (2024). Meningkatkan Kualitas Umkm Dan Pariwisata Berkelanjutan Di Takalar Melalui Pendekatan Partisipatif Dan Digitalisasi. *Proficio*, 6(1), 805–814. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4385>
- Meningkatkan, D., Di, P., & Untung, P. (n.d.). *Menggali potensi budaya betawi dalam meningkatkan pariwisata di pulau untung jawa*. 20–27. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/download/27981/12366>

- Nabila, A., Rasanjani, S., Kuala, U. S., & Publik, K. (2024). *Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak*. IX(2), 88–105.
- Nainggolan, C. D. ., & Sihombing, T. (2022). Koordinasi Pengembangan Pariwisata Pantai Paris Sebagai Potensi Wisata Di Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 443–450.
- Prayuda, H., Prawiranegara, K., Mandala, O. S., & Rahmatyar, A. (2025). *Pelestarian Ekowisata Berbasis Hukum Lingkungan : Sosialisasi Dan Aksi Bersih Pantai Serta Penanaman Mangrove Di Pantai Cemare , Lombok Barat*. 2898, 9–15. <https://e.journal.titannusa.org/index.php/juan/article/download/134/187>
- Sahrul, M., Rauf, P., Latore, S., & Bumulo, S. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola , Kabupaten Gorontalo Utara Community Participation in the Development of the Minanga Beach Tourism Area in Atinggola District , North Gorontalo Regency*. 2(2), 63–74. <http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/download/220/44>
- Serig, D. (2011). Research review. *Teaching Artist Journal*, 9(3), 193–198. <https://doi.org/10.1080/15411796.2011.585906>
- Setiawati, Y., Nusantara, M., Wisata, S., Pesona, S., Awareness, T., Pesona, S., & Tangerang, K. (2025). *Abdimas Pariwisata*. 6(2), 180–189. <https://jurnal.ampta.ac.id/index.php/JAP/article/download/816/573>
- Sirih, M. S., Hasyim, M., Nasruddin, N., & Ahsan, A. (2024). Adaptasi Kebijakan Pengelolaan Wisata untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Dato. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.19184/jtc.v8i1.44187>
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). *Implementasi Community-Based Tourism sebagai Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. 11(1), 159–171. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/download/94077/33150>
- Tsalitsatun, A., Rakhmawati, Y., & Winata, A. Y. S. (2025). *Sinergi Asprim dan Pokdarwis dalam Meningkatkan Potensi Wisata Boekit Tawap dan Semenanjung Pesisir Sumenep*. 11(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/download/28640/11148>
- Wahyuni, N., Humaero, A., Febrina, S., Mukhlis, A., Studi, P., Perairan, B., Pertanian, F., Mataram, U., Mataram, K., Nusa, P., Barat, T., Penyabangan, D., Mina, P., Berkelanjutan, W., Desa, D., & Indonesia, P. (2025). *Jurnal pengabdian perikanan indonesia volume 5 , nomor 1 february 2025 edukasi dan aksi bersih pantai gondol : upaya pengembangan mina wisata berkelanjutan di desa penyabangan , bali*. 5, 1–8. <https://journal.unram.ac.id/index.php/jppi/article/download/6343/3494>